

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2023



Protect The Earth!



Aksi kita, Alam Terjaga

dlh.tanjabbarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. dengan segala Rahmat dan Izin-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023. Penyusunan LKjIP Tahun Anggaran 2023 ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, agar terciptanya sistem pelaporan yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah, dan menjalankan visi misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governace*).

Laporan kinerja ini disusun berpedoman peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan kinerja ini memberikan gambaran tingkat capaian kinerja berdasarkan program dan kegiatan strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 khususnya tahun rencana 2023.

Saran dan masukan sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja OPD dimasa akan datang, sehingga OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal,

2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SUPARIO. SE

Pembina Utama Muda - IV/c

Nip. 19680116 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi	1
B. Struktur Organisasi.....	1
C. Sumber Daya Aparatur	9
D. Sarana dan Prasarana	11
E. Permasalahan Utama.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	29
BAB IV PENUTUP.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai Tugas pokok dan fungsi, Yaitu; melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten dalam urusan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki Struktur Organisasi sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada Bab III Susunan Organisasi Pasal 1 huruf a sampai g bahwa Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

Kepala Dinas

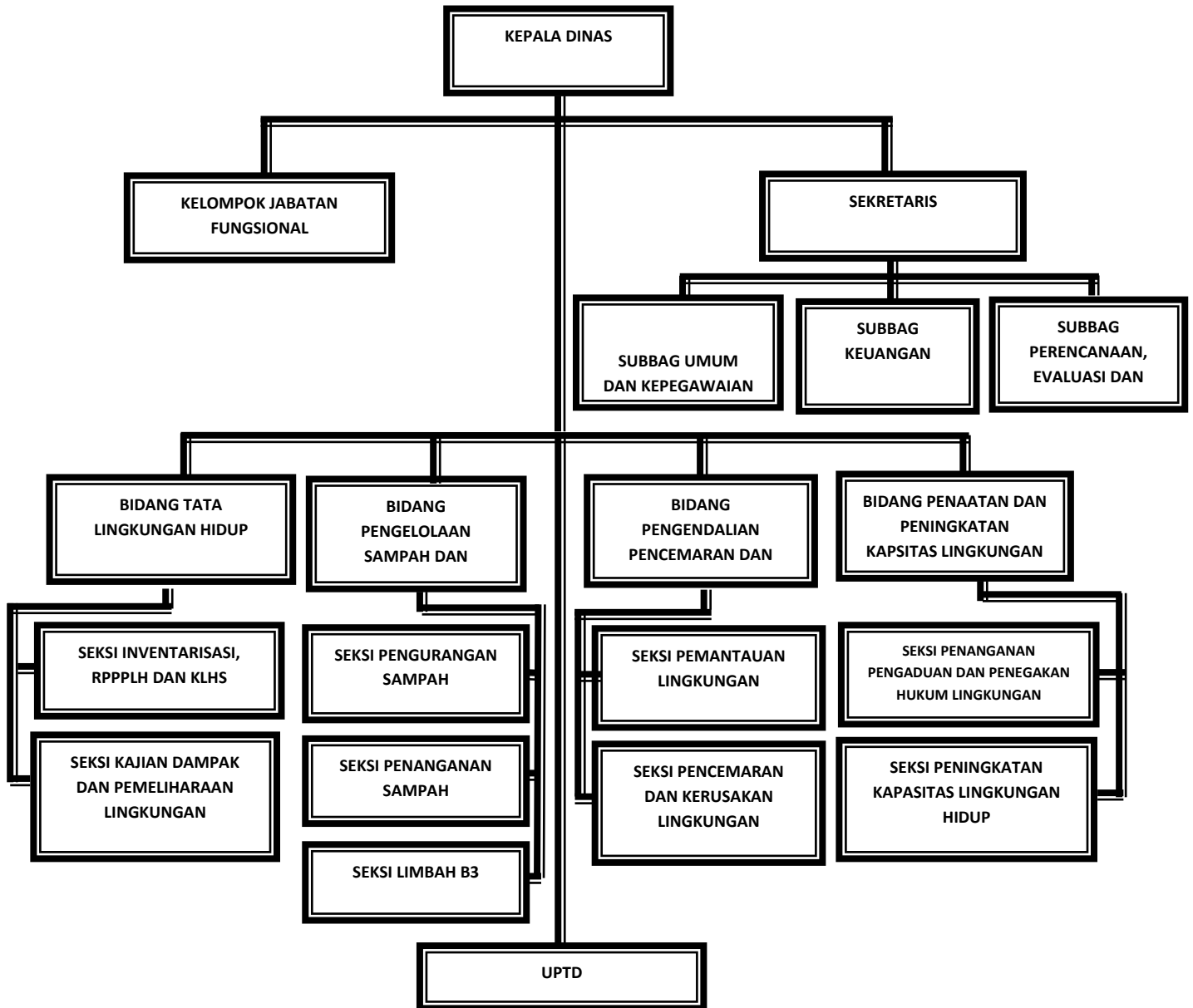
a. Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris, terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

2. Subbagian Keuangan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Program
- b. Bidang Tata Lingkungan Hidup dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang terdiri dari :
1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS
 2. Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin Seorang Kepala Bidang, Terdiri dari :
1. Seksi Pengurangan Sampah;
 2. Seksi Penanganan Sampah; dan
 3. Seksi Limbah B3
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang Terdiri dari :
1. Seksi Pemantauan Lingkungan; dan
 2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin Seorang Kepala Bidang, Terdiri dari :
1. Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup; dan
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana gambar pada halaman berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat berpedoman pada Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 47 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebagai berikut :

1. Terkait dengan Tugas Pokok. Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan Pemerintah Kabupaten di Bidang Lingkungan Hidup, dan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Kesekretariatan dan mempunyai fungsi;

a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;

b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;

c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;

e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala bidang Tata Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Tata Lingkungan Hidup dan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang tata lingkungan hidup;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup inventarisasi, RPPLH dan KLHS meliputi: pengelolaan RPPLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ekonomi lingkungan hidup, sinkronisasi RLPLH nasional, penyusunan NSDA dan LH, SLHD, indeks kualitas lingkungan hidup, sosialisasi RPPLH, dan pengelolaan KLHS;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup kajian dampak lingkungan meliputi: pencegahan pencemaran lingkungan, izin lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, konservasi keanekaragaman hayati, dan pemeliharaan lingkungan;
 - d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pemeliharaan lingkungan hidup meliputi: pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan lingkungan hidup; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, dan mempunyai fungsi;

- a. penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengurangan sampah meliputi: pengolahan data pengurangan sampah, pengelolaan bahan baku produksi dan kemasan, pendaur ulangan sampah, fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup penanganan sampah meliputi: operasional kebersihan dan pembuangan, sistem tanggap darurat, sarana dan prasarana persampahan, serta perizinan pengolahan sampah;
 - d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup limbah B3 meliputi: pelayanan perizinan dan pengolahan limbah B3; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dan mempunyai fungsi
- a. penyusunan, pelaksanaan, pemantuan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pemantauan lingkungan hidup meliputi: pemantauan lingkungan dan baku mutu lingkungan;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengendalian pencemaran lingkungan meliputi: pemantauan, penanggulangan, pemulihan pencemaran institusi dan non institusi, serta sistem informasi kondisi lingkungan hidup;
 - d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengendalian kerusakan lingkungan meliputi: tindaklanjut rekomendasi hasil, kriteria baku kerusakan, pemantauan kerusakan lingkungan, penanggulangan kerusakan, pemulihan lingkungan; dan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Kepala Bidang Petaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Petaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dan mempunyai fungsi
- a. penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang petaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan

- meliputi: pengelolaan pengaduan, pelayanan perizinan, sosialisasi, sengketa lingkungan dan rekomendasi pengaduan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup penegakan hukum lingkungan meliputi: pembinaan, penegakan hukum atas pelanggaran dan penyidikan perkara pelanggaran;
 - d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup peningkatan kapasitas lingkungan hidup meliputi: perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penetapan dan pemberdayaan MHA, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Sumber Daya Aparatur

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Golongan Kepangkatan keadaan bulan Desember 2023 dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Berdasarkan Golongan Kepangkatan

NO.	STATUS	GOLONGAN KEPANGKATAN					JUMLAH
		IV	III	II	I	Lainnya	
1.	PNS	5	16	-	-	-	21
2.	CPNS	-	-	-	-	-	-
3.	TKK	-	-	-	-	40	40
4.	Petugas Persampahan	-	-	-	-	206	214
5.	Petugas Taman	-	-	-	-	37	37
JUMLAH		5	16	-	-	276	299

Dari tabel diatas terlihat bahwa Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Golongan IV ada 5 orang, Golongan III ada 16 orang, sedangkan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Sebanyak 40 Orang, Petugas Persampahan (Kebersihan) sebanyak 206 orang serta petugas taman sebanyak 37 orang. Selanjutnya mengenai Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :

**Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	STATUS	TINGKAT PENDIDIKAN						
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Lainnya
1.	PNS	2	12	5	2	-	-	-
2.	CPNS	-	-	-	-	-	-	-
3.	TKK	-	14	2	24	-	-	-
4.	Petugas Persampahan							206
5.	Petugas Taman							37
JUMLAH		2	26	7	26	-	-	243

Tabel diatas memperlihatkan bahwa 304 orang pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tingkat Pendidikannya S2 2 orang, S1 26 orang, D3 7 orang, SLTA 26 orang, SLTP 0 orang dan SD 0 orang, petugas persampahan 206 orang serta Petugas Taman berjumlah 37 orang. Adapun Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat menurut Tingkat Jabatan dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini :

Tingkat Jabatan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

NO.	TINGKAT JABATAN	JUMLAH ORANG	KETERANGAN
1.	Eselon II	1	Kepala Dinas
2.	Eselon III	5	Sekretaris Dinas/ Kepala Bidang
3.	Eselon IV/ JABATAN FUNGSIONAL	9	
4.	Staf Pelaksana	6	
5.	Staf Administrasi	40	
6.	Petugas Persampahan	206	
7	Petugas Taman	37	
Jumlah		304	

D. Sarana dan Prasarana

Adapun mengenai Sarana dan Prasarana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

Sarana dan Prasarana Pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2023

No	Nama Jenis Barang	Merk Barang	Jumlah Barang (Unit)	Kondisi Barang	Ket
1	- Gedung Bangunan kantor - Gedung Bangunan kantor	Jl. Beringin Kuala Tungkal	1	B	
		Jl. Beringin Kuala Tungkal	1	B	
2	Kendaraan Operasional	Kijang Inova	1	KB	
		Isuzu Dmax	1	B	
		Isuzu Panther	1	KB	
		Ford Ranger	1	B	
		Toyota Rush	1	B	
		Dump Truck Roda 6	8	4B/2KB	
		Dump Truck Armroll	1	KB	

No	Nama Jenis Barang	Merk Barang	Jumlah Barang (Unit)	Kondisi Barang	Ket
		Backhoe Loader	1	KB	
		Excavator	2	1RB/1KB	
		Kendaraan Roda 3	7	B	
		Perahu Motor	1	RB	
3	Sepeda Motor / Kendaraan Roda Dua	Sepeda motor	22	KB	
4	Alat Labor	Gps map	0	KB	
		Ph meter	2	KB	
		Gas analyzer / gas analysis	1	KB	
		Hvs	1	RB	
		Sound level meter	1	KB	
		Analytical balance electronic	1	RB	
		Analytical balance non electronic	1	KB	
		Cod meter	1	KB	
		Anemometer	1	KB	
		Do meter	1	KB	
		Turbidimeter	1	KB	
		Gas sampler	1	KB	
		Combustion gas	1	KB	
		Opacity meter	1	KB	
		Botol sampler 100 ml	1	KB	
		Botol sampler 500 ml	1	KB	
		Ice box	1	KB	
5	PC / Komputer	PC / Komputer	11	B	
6	Laptop	Toshiba, Axioo, Sony, Dell, MSi	7	B	
7	Printer	HP, Canon	7	B	
8	Camera		2	B	
9	Faximili	Panasonic	1	B	
10	Telepon	Asia Phone	1	B	
11	Mesin Tik	Manual Standar	1	B	
12	Proyektor	Toshiba, HP	2	B	
13	AC	LG, Samsung, Jetcool	10	KB	
14	Mesin Genset	Yamamoto	1	B	
15	Meja ½ biro	kayu	35	B	
16	Meja 1 biro	Kayu	2	B	
17	Filling Cabinet (3 pintu)	Daiko, Unital	5	B	

No	Nama Jenis Barang	Merk Barang	Jumlah Barang (Unit)	Kondisi Barang	Ket
18	Filling Cabinet (4 pintu)	Daiko, Unital	5	B	
19	Lemari arsip	Kayu, kaca, besi	14	B	
20	Kursi rapat / kerja		67	B	
21	Kursi tunggu	Besi	2	KB	
22	Lemari	Kaca	1	B	
		Kayu Kaca / 4 pintu	5	B	
		Kayu Kaca / 2 pintu	5	B	
		Arsip Besi / Lion	3	KB	
23	Mesin Potong Rumput	Campuran	7	B	

*ket: (B:Baik, KB:Kurang Baik, RB:Rusak Berat)

E. Permasalahan Utama (Strategic issued)

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan memperhatikan aspek kajian, capaian/kondisi saat ini, standar yang digunakan, faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal. Permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
2. Sulitnya memberikan edukasi dan pemahaman terhadap masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Meningkatnya tekanan terhadap penurunan kualitas udara;
4. Masih rendahnya capaian indeks kualitas tutupan lahan;
5. Belum optimalnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
6. Belum optimalnya pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat dan aparatur pemerintah daerah;

7. Belum optimalnya pemberian penghargaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
8. Masih rendahnya ketaatan pelaku usaha atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah kota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Masih kurangnya sarana prasarana, sumberdaya dan manajemen pengelolaan persampahan dan kebersihan;
10. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan;
11. Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur dan fasilitas pendukung kesehatan dan keselamatan kerja;
12. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan dinas.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Perbup Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup mengampu Sasaran Pembangunan RPJMD nomor 8 yakni “Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup” yang indikator kinerjanya “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”.

**Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Bidang/Urusan
8	Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = \frac{IPA + IPU + ITH}{3}$	Lingkungan Hidup

Berdasarkan IKU Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut Dinas Lingkungan Hidup memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja utama yang terdapat didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,70
2. Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengendalian lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Persentase Usaha/Kegiatan Dari Persampahan Dan Kehati Serta Penataan Dan Penaatan Bidang Lingkungan Hidup	95%

Terkelolanya sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup secara baik, dan terpeliharanya kualitas sumber daya air, tanah, dan udara akan dapat meningkatkan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, melalui sinergi antara penataan ruang dengan penggunaan lahan yang berbasis daya dukung daya tampung, dan melakukan pemantauan terhadap kualitas air sungai, tutupan tanah, dan udara ambien.

Penaatan dan penegakan hukum diarahkan untuk penanganan kasus-kasus lingkungan dengan mengoptimalkan kinerja pejabat penyidik pengawas lingkungan. Penegakan hukum merupakan salah satu cara atau strategi dalam penataan standar, baku mutu, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, dan penurunan kualitas udara dan air adalah tantangan nyata yang dihadapi dunia saat ini akibat aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga lingkungan hidup menjadi esensial agar kita dapat melindungi keberlanjutan planet ini.

Menjaga lingkungan hidup juga berarti memperhatikan pelestarian sumber daya alam yang terbatas, seperti air bersih, hutan, dan biodiversitas. Tanpa upaya konservasi yang serius, kita dapat menghadapi dampak negatif yang serius, seperti kekeringan, kelangkaan pangan, dan kehilangan keanekaragaman hayati.

Secara keseluruhan, menjaga lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab bersama kita sebagai masyarakat. Dengan memprioritaskan keberlanjutan dan melibatkan diri dalam tindakan nyata untuk melestarikan lingkungan, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi planet kita dan generasi yang akan datang.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68.70	72.69	Data Sampling Kualitas Air Sungai, Udara dan Tutupan Lahan
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Persentase Usaha/Kegiatan Yang Menaati Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup	100%	100%	Laporan Tahunan
Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	Survei Masyarakat

2. Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Capaian	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72.69	105,81%	Data Sampling Kualitas Air Sungai, Udara dan Tutupan Lahan
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Persentase Usaha/Kegiatan Yang Menaati Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup	100%	100%	Laporan Tahunan
Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	100%	Survei Masyarakat

Berdasarkan tabel di atas, uraian capaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

1. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - IKLH untuk tahun 2023 ini sudah melebihi target. Realisasi tahun 2023 yakni 72,69. Komponennya meliputi Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Tutupan Lahan (ITH).

$$\begin{aligned} \text{IKLH 2023} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) \\ &= 72.69 \end{aligned}$$

Sumber Formulasi: PermenLHK No. 27 Tahun 2021

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

- Indeks Kualitas Air pada tahun 2023 Kab. Tanjung Jabung Barat mendapatkan hasil perhitungan **IKA 50.00** dengan indeks respon 13,08.

2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

- Indeks Kualitas Udara pada tahun 2023 yang dilakukan Kab. Tanjung Jabung Barat mendapatkan hasil **94.46** dengan indeks respon 10,00.

3) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

- Indeks Kualitas Lahan pada tahun 2023 yang dilakukan Kab. Tanjung Jabung Barat mendapatkan hasil **54.94** dengan indeks respon 12,50.

Untuk capaian IKLH tahun 2023 106%. Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2023 ini adalah kurangnya titik sampel air dan udara yang digunakan untuk melakukan perhitungan.

Agar nilai Indeks yang dihasilkan dapat mewakili kondisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sebenarnya maka diperlukan tambahan titik sampling pengukuran Udara dan Air. Selain itu diperlukan juga peningkatan pengawasan terhadap badan usaha dalam pengelolaan air limbah serta penambahan dan peningkatan personil dalam pengendalian tutupan lahan.

2. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- Pada tahun 2023, telah terjadi penurunan jumlah pengaduan lingkungan hidup akibat dugaan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal tersebut juga disertai dengan kegiatan peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan secara sederhana sehingga indikator kinerja terealisasi sesuai target dengan capaian 100%.

- Desa Dataran Kempas berhasil meraih penghargaan Program Kampung Iklim Lestari (Proklim Lestari) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Proklim merupakan program yang memberikan pengakuan terhadap partisipasi aktif masyarakat yang telah melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi, sehingga dapat mendukung target penurunan emisi GRK nasional dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Proklim Lestari merupakan penghargaan tertinggi terhadap apresiasi pembinaan proklim. Desa Dataran Kempas merupakan satu-satunya di provinsi Jambi yang berhasil meraih penghargaan Proklim Lestari pada tahun 2023.

3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Sebanyak 15.607 Ton sampah yang masuk ke TPA namun angka ini hanya estimasi karena untuk besaran yang lebih terukur diperlukan adanya jembatan timbang. sampah yang masuk ke TPA Lubuk Terentang dapat ditangani sepenuhnya namun sampah yang masuk ke landfill masih terkendala dalam pengaturan sampah yang masuk, dikarenakan volume sampah yang seharusnya ditimbun dengan tanah urug tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran yang tidak memungkinkan untuk menimbun.

Adapun permasalahan yang dihadapi yakni :

- Terbatasnya Prasarana Dan Sarana Yang Menunjang Kegiatan Persampahan
- Kurangnya Petugas Penyapu Jalan, Drainase, Serta Pemetong Rumput Karena Cakupan Luasan Wilayah Kerja Semakin Bertambah Sesuai Dengan Pertumbuhan Dan Perkembangan Penduduk
- Upah Petugas persampahan yang Masih Dibawah Umr

Namun dengan keterbatasan sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dapat mengoptimalkan pengelolaan persampahan walaupun

tidak 100% pendistribusian sampah di Kabupaten dapat terangkut penuh.

Sebagai salah satu contoh Kabupaten Tanjung Jabung Barat membina 2 Desa terkait program dari Provinsi yang dinamakan “Kampung Mantap”. Program ini diperuntukan demi menjaga ekosistem yang ada di Sungai Batanghari ungkap Gubernur Jambi Al Haris.

Melalui program provinsi ini Dinas Lingkungan Hidup beserta berbagai kalangan membina 2 desa yakni Desa Semau dan Desa Teluk Nilau yang mana salah satunya mendapat predikat sebagai kampung mantap juara II se provinsi Jambi yakni desa Teluk Niau.

4. Bidang Tata Lingkungan

- Selama tahun 2023 sebanyak 49 perusahaan yang disetujui rekomendasi perizinan SPPL.
- Permasalahan yang dihadapi ada beberapa perusahaan yang belum menyampaikan laporan dokumen RKL-RPL, dan para pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak bisa melakukan survei ke beberapa perusahaan yang belum menyampaikan dokumen tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran untuk survei lapangan sebab banyak perusahaan yang berada di luar daerah.

Berdasarkan Permen LH No 16 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk kriteria wajib amdal, wajib memiliki Dokumen RKL-RPL dan wajib melaporkan setiap per 6 (enam) bulan sehubungan dengan PP 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan mewajibkan pemegang izin lingkungan wajib menyampaikan Laporan RKL-RPL secara berkala setiap 6 bulan sekali (Pasal 53).

3. Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi						Sumber Data
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	69,61	72,69	-	-	-	Data Sampling
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Indeks Pengelolaan Sampah	14,11	16,21	13,79	-	-	-	Laporan Kinerja
	Persentase Usaha/Kegiatan Yang Menaati Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup	100%	90%	100%	-	-	-	Laporan Tahunan
Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	85%	B	-	-	-	Survei Masyarakat
	Nilai SAKIP	60,50	64,51	67,87	-	-	-	LHE Sakip
	Persentase Penurunan Temuan Inspektorat/BPKP	100%	100%	100%	-	-	-	Dokumen Keuangan

4. Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Target Kinerja						Sumber data
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Nihil									

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.

- Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ” sangat baik dikarenakan 100% dari apa yang menjadi target Dinas Lingkungan Hidup. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini selain sudah merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Barat yang harus dilaksanakan juga tidak terlepas dari pemantauan berkala kualitas lingkungan dan koordinasi dengan pihak perusahaan dalam hal memfasilitasi pengambilan sampel, dan juga tersedianya laboratorium DLH Provinsi Jambi yang jaraknya masih dapat ditempuh dengan kendaraan.
- Keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat”. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dapat dicapai melalui peningkatan kualitas SDM Tanjung Jabung Barat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Terbukti pada tahun 2023 ini Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada dua daerah mendapatkan penghargaan berupa “Kampung Mantap” pada Kelurahan Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan dan “Proklamasi Lestari” pada Desa Dataran Kempas, Kecamatan Tebing Tinggi.

6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Tahun 2023
a. Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Akhir RPJMD	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	600%	100%	97%	97,00
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya penyusunan anggaran dan mengevaluasi anggaran DLH tiap bulan dan tahun	42 Laporan	7 Laporan	6 Laporan	85,71
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tahunan OPD	24 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	22 Orang/Bulan	91,67
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Kartu Inventarisasi	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
8	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
9	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00
10	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	64.600 Dokumen	13.000 Dokumen	5.305 Dokumen	40,81

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Akhir RPJMD	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kehadiran Pegawai/ASN	600%	100%	100%	100,00
11	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	420 Paket	68 Paket	68 Paket	100,00
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	600%	100%	100%	100,00
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6.250 Paket	1.000 Paket	1.000 Paket	100,00
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan BMD penunjang Urusan OPD	1.108 Unit	1.035 Unit	60 Unit	5,80
14	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	44 Unit	16 Unit	53 Unit	331,25
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4.600 Unit	1.000 Unit	7 Unit	0,70
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	23 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	75,00
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00
17	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.339 Unit	235 Unit	60 Unit	25,53
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	234 Unit	35 Unit	23 Unit	65,71
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	27 Unit	4 Unit	4 Unit	100,00
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	20 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/ Kota	Terlaksananya Penyusunan Dokumen DDDTLH Dokumen RPPLH	4 Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	0,00

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Akhir RPJMD	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
		Yang dilegalisasi				
21	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	4 Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	0,00
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah KLHS	16 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00
22	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	13 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKA/IKU/IKTL/IKAL/ IKEG	67/95/57.5/79.2/75.6	65.5/94.4/56./77.8/74.4	60.00/94.47/54.18/0/0	96,75
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	11 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50,00
23	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
24	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Pengelolaan Gambut (RPG)	2 Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	0,00
25	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	2 Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	0,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	90%	75%	100%	133,33
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	90%	75%	100%	133,33
26	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
27	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	102 Ha	20 Ha	20 Ha	100,00

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Akhir RPJMD	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
28	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	3.090 Unit	18 Unit	18 Unit	100,00
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) PADA USAHA/ KEGIATAN	600%	100%	500%	144,00
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3	600%	100%	500%	144,00
29	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	50 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	500,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	600%	100%	70%	69,99
	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	600%	100%	70%	69,99
30	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	100 Dokumen	20 Dokumen	22 Dokumen	110,00
31	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Orang	2 Orang	- Orang	0,00
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	CAKUPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	500%	80%	100%	125,00

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Akhir RPJMD	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Data Inventarisasi MHA Kearifan Lokal Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
33	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN & PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE MASYARAKAT KECAMATAN YANG MENINGKAT PENGETAHUAN/ PEMAHAMAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP	495%	80%	100%	125,00
	Penyelenggaraan Pendidikan. Pelatihan & Penyuluhan Lingkungan Hidup. untuk lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Sosialisasi/ Pelatihan	33 Sekolah	6 Sekolah	6 Sekolah	100,00
34	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/ Kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	27 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	100,00
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAK LANJUTI	600%	100%	100%	100,00
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	600%	100%	100%	100,00
35	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	18 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	514%	85%	53,32%	62,73
	Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	514%	85%	53,32%	62,73
36	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	468.000 Ton	78.000 Ton	15.607 Ton	20,01

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Akhir RPJMD	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
37	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat. Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	55 Kelompok	10 Kelompok	4 Kelompok	40,00
38	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5.620 Unit	1.120 Unit	1.120 Unit	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja						98,71

b. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Anggaran DPA	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.930.429.993	4.575.247.882	92,80
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya penyusunan anggaran dan mengevaluasi anggaran DLH tiap bulan dan tahun	173.059.900	169.959.900	98,21
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.559.900	73.259.900	99,59
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	99.500.000	96.700.000	97,19
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tahunan OPD	3.588.127.343	3.345.552.521	93,24
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.136.407.143	2.897.937.321	92,40
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	299.470.000	295.365.000	98,63
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.500.000	11.500.000	100,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	81.400.200	81.400.200	100,00
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	59.350.000	59.350.000	100,00
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Kartu Inventarisasi	17.000.000	17.000.000	100,00
8	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	17.000.000	17.000.000	100,00
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan	63.400.000	63.000.000	99,37
9	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	11.000.000	10.800.000	98,18
10	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	52.400.000	52.200.000	99,62
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kehadiran Pegawai/ASN	35.750.000	35.072.000	98,10
11	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35.750.000	35.072.000	98,10
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	484.297.550	481.141.645	99,35

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Anggaran DPA	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	102.034.000	98.998.000	97,02
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	382.263.550	382.143.645	99,97
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan BMD penunjang Urusan OPD	73.922.000	73.832.000	99,88
14	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23.003.000	22.913.000	99,61
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50.919.000	50.919.000	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	158.198.000	122.586.492	77,49
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00
17	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	99.120.000	79.768.500	80,48
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	56.078.000	39.817.992	71,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.675.200	267.103.324	79,34
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	271.535.200	202.467.324	74,56
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	65.140.000	64.636.000	99,23
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	513.230.000	278.425.000	54,25
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/ Kota	Terlaksananya Penyusunan Dokumen DDDTLH Dokumen RPPLH Yang dilegalisasi	49.520.000	47.700.000	96,32
21	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	49.520.000	47.700.000	96,32
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah KLHS	463.710.000	230.725.000	49,76
22	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	463.710.000	230.725.000	49,76
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKA/IKU/IKTL/IKAL/ IKEG	289.699.600	269.586.380	93,06

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Anggaran DPA	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	264.999.600	244.886.380	92,41
23	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	138.999.600	119.461.380	85,94
24	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	126.000.000	125.425.000	99,54
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Pengelolaan Gambut (RPG)	24.700.000	24.700.000	100,00
25	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	24.700.000	24.700.000	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.301.693.000	1.255.673.983	96,46
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.301.693.000	1.255.673.983	96,46
26	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	138.300.000	136.832.000	98,94
27	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	678.720.000	656.116.983	96,67
28	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	484.673.000	462.725.000	95,47
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) PADA USAHA/ KEGIATAN	174.587.500	167.174.364	95,75
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3	174.587.500	167.174.364	95,75
29	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	174.587.500	167.174.364	95,75
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	156.520.000	154.100.000	98,45

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Anggaran DPA	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	156.520.000	154.100.000	98,45
30	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	50.170.000	47.850.000	95,38
31	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24.100.000	24.100.000	100,00
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	82.250.000	82.150.000	99,88
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA). KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	CAKUPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	35.500.000	34.500.000	97,18
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Data Inventarisasi MHA Kearifan Lokal Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	35.500.000	34.500.000	97,18
33	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	35.500.000	34.500.000	97,18
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN & PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERESENTASE MASYARAKAT KECAMATAN YANG MENINGKAT PENGETAHUAN/ PEMAHAMAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP	28.700.000	28.600.000	99,65
	Penyelenggaraan Pendidikan. Pelatihan & Penyuluhan Lingkungan Hidup. untuk lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Sosialisasi/ Pelatihan	28.700.000	28.600.000	99,65
34	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/ Kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	28.700.000	28.600.000	99,65
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAK LANJUTI	37.760.000	34.560.000	91,53

No.	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Anggaran DPA	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	37.760.000	34.560.000	91,53
35	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	37.760.000	34.560.000	91,53
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8.555.383.160	8.211.360.570	95,98
	Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	8.555.383.160	8.211.360.570	95,98
36	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.664.093.400	1.633.547.320	98,16
37	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat. Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	76.024.000	46.566.000	61,25
38	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	6.815.265.760	6.531.247.250	95,83
Total dan Rata-rata			16.023.503.253	15.009.228.179	93,67

BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja program/kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2023 secara umum, semuanya terlaksana dengan persentase keberhasilan rata – rata **98,71%**. Namun dengan capaian kinerja tersebut, tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan, masih ada kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi guna meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditahun mendatang.

Langkah-langkah yang perlu diambil dimasa mendatang untuk meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

- Perlu peningkatan alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
- Pemenuhan sarana dan prasarana serta kesejahteraan petugas perlu ditingkatkan lagi,
- Sumber daya manusia yang menguasai bidang lingkungan hidup masih kurang. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas para PPLHD.

Akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023 ini dapat kami selesaikan dengan baik. Namun kami masih menyadari ada kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Untuk itu kami memerlukan saran dan kritik yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.